



Vol. 22 No. 4 (2025)

**KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen**

P-ISSN 1907-3011 | E-ISSN 2528-1127

Page 539-550

OPEN ACCESS

## **Masa Depan *Global Governance*: Perspektif BRICS dalam Tata Kelola Ekonomi Dunia**

### ***The Future of Global Governance: A BRICS Perspective on World Economic Governance***

**Muhammad Faisal Aziz<sup>1</sup>✉, Rizki Septin Amalia<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

<sup>2</sup>Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: muhammadfaisalaziz@fisip.unmul.ac.id

#### **Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi kontribusi BRICS dalam menangani ekonomi dunia yang semakin kompleks akibat dampak globalisasi dan kemajuan teknologi. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Teori tata kelola global menjadi landasan dalam menjelaskan kontribusi BRICS, dengan penekanan pada pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam sistem global. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun BRICS menghadapi isu internal seperti ketidakseimbangan kekuatan dan perselisihan politik antar negara, kelompok ini masih memiliki potensi besar untuk memperbaiki lembaga internasional dan mempromosikan sistem ekonomi yang lebih adil serta inklusif bagi semua pihak.

#### **Abstract**

*This study explores the contribution of BRICS in dealing with the increasingly complex global economy due to the impact of globalization and technological advances. This study applies a descriptive qualitative approach. Global governance theory is the basis for explaining the contribution of BRICS, with an emphasis on the importance of collaboration between governments, the private sector, and non-governmental organizations in the global system. The results of this study indicate that despite facing internal issues such as power imbalances and political disputes between countries, BRICS still has great potential to improve international institutions and promote a more equitable and inclusive economic system for all parties.*

*This is an open-access article under the CC-BY-SA license.*



Copyright © 2025 Muhammad Faisal Aziz, Rizki Septin Amalia

#### **Article history**

Received 2025-08-03

Accepted 2025-10-20

Published 2025-11-30

#### **Kata kunci**

BRICS;  
Tata Kelola Global;  
Inklusivitas

#### **Keywords**

BRIC;  
Global Governance;  
Inclusivity.

## 1. Pendahuluan

Para pakar di bidang hubungan internasional baru-baru ini telah mengidentifikasi dua perubahan utama dalam tata Kelola global. Perubahan yang pertama adalah transisi dari sistem pemerintahan yang lama, yaitu pendekatan tradisional yang bersifat tertutup dan hanya melibatkan pihak-pihak resmi seperti perjanjian dan organisasi internasional formal, ke bentuk kerja sama yang lebih bervariasi. Bentuk kerjasama ini kini semakin sering melibatkan aktor non-negara, seperti perusahaan swasta dan lembaga non-pemerintah (Avant et al., 2010).

Saat ini, keadaan di dunia internasional ditandai oleh meningkatnya persaingan dan ketegangan antara kekuatan-kekuatan besar yang berusaha mengubah usaha integrasi antar kawasan dan menghadapi ancaman baru terhadap keamanan dunia. Negara-negara berkembang kini mengambil peran yang lebih penting dalam tren ini, terutama melalui peningkatan kerja sama di antara negara-negara berkembang. Meskipun ekonomi negara-negara ini telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, kekuatan politik mereka masih terbatas karena sistem global saat ini tetap tidak banyak berubah (Duggan et al., 2022a). Pertumbuhan negara-negara pasar berkembang dan negara-negara yang sedang berkembang sejalan dengan pola fragmentasi dalam sistem ekonomi global yang sudah ada (Biermann et al., 2009).

Pertama kali diperkenalkan oleh seorang ekonom dari Goldman Sachs yang bernama Jim O'Neill, istilah BRIC muncul pada tahun 2001. Istilah ini adalah singkatan yang menunjukkan empat negara dengan ekonomi yang sedang berkembang, yang diyakini akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara yang sudah maju dalam beberapa dekade mendatang, yaitu Brasil, Rusia, India, dan China (O'Neill, 2001). Akronim BRIC mulai menarik perhatian setelah Goldman Sachs BRIC Fund didirikan pada tahun 2006, yang juga menandai awal dari kerja sama diplomatik yang tidak resmi di antara keempat negara tersebut. Dua tahun setelah itu, singkatan BRIC secara resmi digunakan untuk pertama kalinya dalam sebuah Komuniké Menteri Luar Negeri pada tahun 2008. Dalam dokumen itu, dinyatakan bahwa ada dialog BRIC yang diakui berdasarkan pada saling percaya, saling menghormati, kesamaan kepentingan, serta cara yang serupa dalam menangani isu penting dalam perkembangan global (The Foreign Ministers of Brazil, 2008). Pertemuan KTT BRIC yang pertama diadakan di Yekaterinburg, Rusia, pada tahun 2009. Setelah Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, akronim itu secara resmi berubah menjadi BRICS.

Meskipun demikian, kemunculan Brasil, China, dan India sebagai negara-negara yang sedang berkembang dalam ekonomi global, serta kontribusi mereka yang semakin berarti dalam masalah dunia, tidak bisa disangkal. Tiap negara ini berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan pengaruh mereka baik di tingkat lokal maupun global. Ini terjadi bersamaan dengan kemajuan ekonomi negara-negara tersebut yang didukung oleh jumlah penduduk yang besar (Freddy & Thomas, 2023). Usaha besar telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk menggabungkan kekuatan masa depan BRICS ke dalam sistem pengaturan ekonomi yang sudah ada, mirip dengan apa yang dilakukan oleh G8, yang pada waktu itu masih termasuk Rusia. Antara tahun 2005 dan 2009, diadakan beberapa pertemuan tahunan G8+5, yang melibatkan empat negara BRICS yang akan datang dan juga Meksiko (Swanson's, 2024).

Dalam waktu yang singkat, cara kerja BRICS menunjukkan kekuatan strategis dalam mengatur hubungan internasional, berpartisipasi dalam keputusan penting di seluruh dunia, dan memainkan peran penting dalam negosiasi masalah global. Sementara negara-negara Barat mengalami kesulitan karena krisis ekonomi, negara-negara BRICS malah memperkuat posisi ekonomi dan politik mereka di arena internasional Li(Li & Pogodin, 2020). Untuk mendorong tata kelola global di sektor ekonomi, BRICS mengusulkan rencana reformasi untuk anggotanya, yang menggambarkan komitmen untuk bersatu dan membangun dunia yang lebih adil dan setara.

Dampak dari kelompok ini tidak hanya terlihat dari kekuatan ekonominya, yang memberikan lebih dari 40% kontribusi untuk populasi dunia dan hampir 25% untuk Produk Domestik Bruto (PDB) global, tetapi juga dari peran pentingnya dalam mengatasi masalah-masalah yang berpengaruh secara global (O'Neill, 2001). Ini menunjukkan bahwa ada fase baru dalam perkembangan kelompok tersebut yang berdampak pada ekonomi. Saat ini, perluasan kelompok ini bertujuan untuk menunjukkan daya tarik kemitraan bagi negara-negara berkembang dan

negara-negara yang sedang tumbuh, yang menganggap kelompok ini sebagai tempat untuk menyampaikan suara "*Global South*". Di samping itu, perluasan ini juga membantu dalam menciptakan kelompok yang lebih besar (BRICS+) sebagai kekuatan penting dalam mengatur tata kelola ekonomi dunia.

Tata kelola global menjadi konsep penting dalam mempelajari Hubungan Internasional, terutama karena ekonomi dunia kini semakin saling terhubung dan membutuhkan aturan yang melibatkan lebih dari satu negara. Prakash dan Hart mengatakan bahwa globalisasi telah mengubah cara pengaturan dari yang sebelumnya berpusat pada negara saja menjadi lebih rumit, melibatkan negara, organisasi internasional, perusahaan swasta, serta masyarakat dalam sebuah jaringan yang kompleks (Prakash & A.Hart, 2000). Dalam konteks ini, muncul pertanyaan tentang bagaimana negara-negara berkembang, seperti BRICS, dapat memanfaatkan kondisi ini untuk memperkuat peran mereka dalam ekonomi global.

Literatur lain menjelaskan bahwa pemerintahan swasta bisa menjadi alternatif dalam mengatur berbagai hal. (Falkner, 2003) menunjukkan bahwa standar dan aturan yang dibuat oleh pihak swasta, seperti perusahaan besar atau kelompok industri, sering dianggap resmi setelah diterima oleh pemerintah atau organisasi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa cara mengatur di masa kini semakin campuran, di mana metode pemerintahan publik dan swasta saling melengkapi. Bagi BRICS, temuan ini penting karena memberi kesempatan untuk mengajak pelaku ekonomi dalam negeri dan global dalam membentuk sistem tata kelola ekonomi dunia yang lebih terbuka.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mempelajari usaha BRICS untuk tidak hanya menjadi saingan bagi dominasi negara-negara Barat, tetapi juga berfungsi sebagai penentu kebijakan dalam tata kelola ekonomi global. Penelitian ini menerapkan pendekatan yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara aktor di tingkat negara, sektor swasta, dan tingkat sub-nasional, serta menunjukkan strategi yang bersifat inklusif yang diadopsi BRICS dalam membangun kepercayaan dan keberlanjutan sistem ekonomi global saat ini.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini menganalisis koalisi BRICS, yang terdiri dari negara-negara berkembang yang mewakili lebih dari 40% populasi dunia dan sekitar 25% dari PDB global, sehingga menjadikannya menjadi aktor penting dalam peta dunia (Radulescu et al., 2014a). Populasi dalam konteks ini tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Selain itu, populasi tidak sekadar berupa jumlah; seperti yang ditekankan oleh O'Neill (2001). Sementara mayoritas literatur sebelumnya fokus pada dominasi institusi yang dipimpin oleh Barat, penelitian ini lebih menyoroti upaya BRICS dalam menyesuaikan kembali dominasi tersebut serta mendorong inklusivitas dalam tata kelola ekonomi global (Chen & Zhang, 2025a; Li & Pogodin, 2020).

Kedua, penelitian ini didasarkan pada berbagai penelitian sebelumnya mengenai tata kelola global yang memfokuskan pada pluralitas dalam tata kelola (Biermann et al., 2009), peran aktor yang bukan negara (Falkner, 2003), serta kerja sama antarnegara berkembang (Duggan et al., 2022b). Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara jelas menguji BRICS sebagai tantangan serta mitra dalam sistem tata kelola global, serta bagaimana aliansi ini berusaha menghadapi perlawanan terhadap hegemoni Barat sambil tetap berkolaborasi secara konstruktif.

Ketiga, studi ini secara khas mengangkat Bank Pembangunan Baru (NDB) sebagai wujud nyata dari visi BRICS, dengan penekanan pada kontribusinya dalam mendukung dedolarisasi, pembangunan yang berkelanjutan, serta pendanaan yang inklusif (Bezerra, 2020a; Waisbich & Borges, 2020). Melalui analisis terhadap desain institusional dan praktik NDB, penelitian ini memperluas pemahaman dalam literatur mengenai tata kelola keuangan alternatif, melampaui institusi Bretton Woods.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang relevan bagaimana BRICS mencerminkan harapan *Global South* untuk memiliki peran lebih besar dalam mengambil keputusan di tingkat global. Penelitian ini juga menekankan betapa pentingnya kerja sama antara berbagai tingkat negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun sistem tata kelola ekonomi dunia yang lebih adil dan inklusif.

## 2. Metode

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ingin menggambarkan dengan jelas peran BRICS dalam tata kelola global. Selain itu, penelitian juga menganalisis tantangan dan peluang yang mungkin muncul di masa depan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Kontribusi BRICS terhadap Pembangunan Tata Kelola Ekonomi Global.

Kebangkitan BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika kekuatan dunia. Kebangkitan ini telah membawa pertanyaan serius terhadap stabilitas sistem tata kelola global yang telah lama didominasi oleh Negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat. BRICS telah menunjukkan potensi besar untuk menjadi kekuatan utama dalam perekonomian dunia.

Dalam konteks struktur pengelolaan ekonomi global saat ini, organisasi internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia memainkan peran penting bagi negara-negara BRICS dalam berunding dan memperbaiki mekanisme tata kelola global. Semua negara BRICS adalah anggota aktif dari lembaga-lembaga ini dan terlibat dalam pengambilan keputusan secara global. Meski demikian, hubungan antara BRICS dan sistem ekonomi global ini cukup rumit, dengan berbagai pendapat yang muncul dari para ahli realis dan liberal (Shaw, 2015).

Tata kelola ekonomi global perlukan menuju isu-isu transnasional kontemporer yang memerlukan perhatian lebih dalam kontribusi mereka terhadap pembangunan berkelanjutan. Kerja sama ekonomi antara negara-negara BRICS memainkan peran penting di sini, dengan karakteristik menyatukan yang meliputi keinginan untuk memiliki pengaruh lebih besar dalam urusan global. Tujuan utama BRICS adalah untuk menyelaraskan strategi kesepakatan dalam menghadapi tantangan global serta memperkuat posisi mereka terhadap kekuatan ekonomi tradisional. Berbagai KTT telah diadakan, yang membahas berbagai isu seperti perubahan iklim, dan pengentasan kemiskinan. Pada setiap pertemuan, BRICS berupaya menyusun agenda bersama yang bercakup aspek sosial, ekonomi, dan keamanan (PRIA, 2024).

Secara keseluruhan, BRICS bukan hanya menjadi forum bagi negara-negara ekonomi besar, tetapi juga menjadi arena bagi masyarakat sipil untuk partisipasi bersama membentuk agenda global serta mempromosikan kepentingan masyarakat luas. Selain fokus pada kerjasama di dalam kelompok BRICS, kelompok ini juga mendorong dialog dan kerjasama ekstensif dengan negara-negara lain dari bagian Selatan, di bawah kerjasama Selatan-Selatan, untuk memperkuat daya tawar negara-negara berkembang dalam struktur politik dan ekonomi global melalui model pertukaran inklusif (Chen & Zhang, 2025b).

Tabel 1 dalam tulisan ini memperlihatkan seberapa besar sumbangannya negara-negara BRICS terhadap perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) global pada berbagai periode. Data ini menggambarkan bagaimana kelompok negara ini menjadi faktor utama penggerak pertumbuhan ekonomi global selama dua dekade terakhir, terutama berkat laju pertumbuhan ekonomi yang pesat di China dan India (Yardley, 2012). Tabel ini juga mengindikasikan bahwa peran ekonomi negara-negara BRICS semakin dominan dibandingkan dengan negara maju dan negara berkembang lainnya, yang menegaskan posisi penting mereka dalam perekonomian global yang semakin terintegrasi.

**Tabel 1. Indikator Geografis dan Ekonomi Negara-negara BRICS 2012**

Negara	Luas Wilayah (juta km <sup>2</sup> )	Populasi (juta orang)	PDB (PPP) miliar \$	PDB per kapita (\$)
Brasil	8,6	198,7	2330,2	11.747,6
China	9,6	1351	12.261,2	9.055,3
India	3,6	1237	4.715,6	3.842,6
Rusia	17,1	143,5	2.486,2	17.518
Afrika Selatan	1,2	51,19	576,1	11.281,1

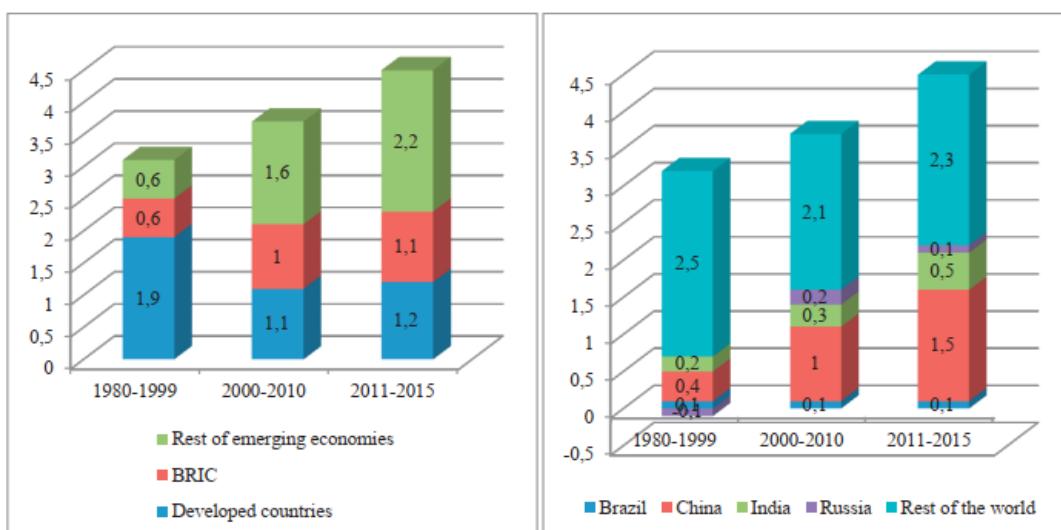
Sumber: (Radulescu et al., 2014).

Tabel ini menguraikan karakteristik geografi dan ekonomi dari kelima negara BRICS pada tahun 2012. Rusia memiliki luas wilayah terbesar yaitu 17,1 juta km<sup>2</sup>, diikuti oleh China dan Brasil. Dalam hal populasi, China dan India berada di urutan teratas dengan masing-masing lebih dari satu miliar penduduk. Ini menunjukkan kekuatan tenaga kerja dan potensi pasar yang sangat besar.

Berdasarkan produk domestik bruto (PDB), China berada di posisi pertama dengan lebih dari 12 triliun dolar AS, yang menggambarkan ukuran ekonominya yang sangat besar. Di sisi lain, Rusia mencatatkan PDB per kapita tertinggi di antara kelima negara BRICS, yaitu sekitar 17.518 dolar AS, mencerminkan pendapatan rata-rata yang lebih tinggi meskipun populasinya tidak terlalu besar. Sementara itu, Brasil dan Afrika Selatan juga mencatatkan PDB per kapita lebih dari 11.000 dolar AS, sedangkan India masih memiliki angka yang lebih rendah, sekitar 3.800 dolar AS.

Perkiraan IMF hingga tahun 2015 menunjukkan bahwa populasi global diperkirakan akan meningkat sekitar 138,2%. Negara-negara yang sedang berkembang diprediksi akan mengalami pertumbuhan lebih cepat, dengan angka sekitar 165,1%. Sementara itu, kelompok BRICS diprediksi akan mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 132,7%, yang sedikit lebih rendah dibandingkan daerah lain seperti Amerika Latin dan Timur Tengah serta Afrika, yang masing-masing tumbuh 192% dan 295% (Radulescu et al., 2014a).

Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara yang sedang berkembang, khususnya kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), telah memainkan peran yang signifikan dalam kemajuan ekonomi global. Percepatan ekonomi di negara-negara ini tidak hanya menambah kontribusi mereka terhadap PDB dunia, tetapi juga mencerminkan pergeseran besar dalam kekuatan ekonomi di seluruh dunia.



Gambar 1. Kontribusi BRICS ke GDP Global

Sumber: [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)

Penelitian Orgaz, Molina and Carrasco dalam (Radulescu et al., 2014b) Gambar 1, mencerminkan negara-negara berkembang mulai menyulut ketertinggalan ekonomi mereka dari negara-negara maju. Secara khusus, sejak tahun 1995, pendapatan per kapita di negara-negara berkembang mengalami pertumbuhan yang konsisten, dengan rata-rata meningkat sebesar 1,4% hingga tahun 2003, dan kemudian meloncat menjadi 4,8% antara tahun 2004 dan 2008. Pertumbuhan total dalam periode lima tahun itu mencapai 26%, menandakan adanya percepatan yang signifikan. Untuk negara-negara BRIC, angka pertumbuhan pendapatan per kapita bahkan lebih tinggi, dengan rata-rata mencapai 7% dalam periode 2004-2008, di mana China tumbuh sebesar 10,6% dan India 4,8%. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara BRIC memiliki peran crucial dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang dan menunjukkan potensi besar untuk mengejar ketertinggalan ekonomi dengan negara-negara maju di seluruh dunia.

### 3.2. BRICS dan New Development Bank (NDB)

Dalam konteks tata kelola global, *New Development Bank* merupakan prestasi signifikan dalam memperkuat kolaborasi di antara negara-negara anggota BRICS. NDB dianggap sebagai alat yang penting untuk mengatasi dua isu utama kelompok ini, yaitu membangun kepercayaan di antara anggotanya serta mempercepat kerjasama yang bermanfaat secara nyata. Namun, proses pembentukan NDB, yang melibatkan negosiasi politik dan ekonomi yang kompleks, menunjukkan betapa sulitnya mencapai kesepakatan tujuan di antara anggota yang memiliki latar belakang dan aspirasi yang berbeda. Selain itu, NDB juga mengembangkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan hubungan antar wilayah dan kerjasama regional, sekaligus membuka peluang untuk menambah anggotanya dengan melibatkan tidak hanya negara-negara dari selatan, tetapi juga negara-negara maju, yang menggambarkan pergeseran dari kolaborasi selatan-selatan ke kolaborasi selatan-utara (Duggan et al., 2022c).

Struktur tata kelola ekonomi global sering dianggap tidak adil oleh negara-negara yang berkembang. Lembaga Bretton Woods, termasuk IMF dan Bank Dunia, dibentuk setelah Perang Dunia II untuk mencegah krisis ekonomi global dan menyediakan dukungan finansial kepada negara-negara yang membutuhkan. Namun, sejak pertengahan 1970-an, mereka mulai mengalami kritik dari negara-negara berkembang yang melihat mereka sebagai alat dominasi bagi negara-negara maju.

Perdebatan mengenai pengurangan pemakaian dolar AS di antara negara-negara BRICS dipicu oleh sejumlah faktor sejarah dan strategis. Para anggota BRICS sangat bertekad untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar Amerika, yang telah memberikan kekuatan yang besar kepada AS dalam struktur keuangan global dan memberi mereka kesempatan untuk campur tangan dalam kebijakan moneter negara lain, sering kali tidak sejalan dengan kepentingan negara tersebut (Nogueira Batista Jr., 2023).

BRICS muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap dominasi Barat dalam geopolitik dan ekonomi global. Mereka menawarkan alternatif dengan menyerukan reformasi keuangan internasional yang lebih inklusif dan mencerminkan kekuatan ekonomi global yang baru. Salah satu kritik utama BRICS terhadap lembaga Bretton Woods adalah ketidaktransparan dan terlalu mengedepankan kepentingan negara-negara Barat.

Sebagai hasil dari visi dan persepsi BRICS terhadap tata kelola keuangan global, BRICS mendirikan Bank Pembangunan Baru (NDB) pada tahun 2014 di Brasil (Bezerra, 2020b). Tujuan utama pendirian NDB adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek keberlanjutan di negara-negara berkembang, terutama di negara-negara anggota BRICS, dengan modal awal sebesar 50 miliar dolar AS. NDB dirancang dengan struktur manajemen yang memberikan suara yang setara kepada setiap anggota, serta memberikan alternatif bagi lembaga keuangan global yang sudah ada (Stojkovic, 2016).

NDB memiliki peran yang signifikan dalam usaha mengurangi ketergantungan pada dollar Amerika Serikat di kalangan negara-negara BRICS. Dalam rangka mencapai hal tersebut, NDB telah memperkenalkan berbagai mekanisme dan ide yang dibuat khusus untuk membantu negara-negara ini menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Usaha de-dolarisasi yang dilakukan oleh negara-negara BRICS merupakan langkah signifikan yang mengindikasikan niat untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Selain itu, inisiatif ini juga mengisyaratkan kemungkinan terjadinya perubahan besar dalam sistem keuangan global. Proses ini menghadirkan berbagai peluang, namun juga tantangan yang kompleks, mencakup berbagai aspek seperti teknologi, politik, serta kolaborasi antara negara-negara anggota BRICS.

Dengan berkantor pusat di Shanghai, Cina, dan pusat regional di Johannesburg, Afrika Selatan, bank ini bertujuan untuk mempererat kerjasama ekonomi antarnegara BRICS. Keberadaan NDB sangat relevan di tengah tantangan ekonomi global, terutama setelah krisis keuangan, karena diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta mempromosikan kolaborasi di antara negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan global.

Sejak pendiriannya, NDB telah menyetujui lebih dari 50 pinjaman dengan total sekitar USD 15 miliar, digunakan untuk membiayai proyek-proyek terkait energi terbarukan, infrastruktur, dan pengembangan berkelanjutan lainnya. Melalui inisiatif ini, BRICS berharap dapat berperan lebih besar dalam arsitektur keuangan global dan memberikan suara pada kebijakan internasional yang lebih adil dan terwakili. NDB berusaha membangun hubungan kemitraan yang seimbang dengan negara-negara penerima, dalam dialog yang saling menghormati dan bekerja bersama mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Bezerra, 2020b).

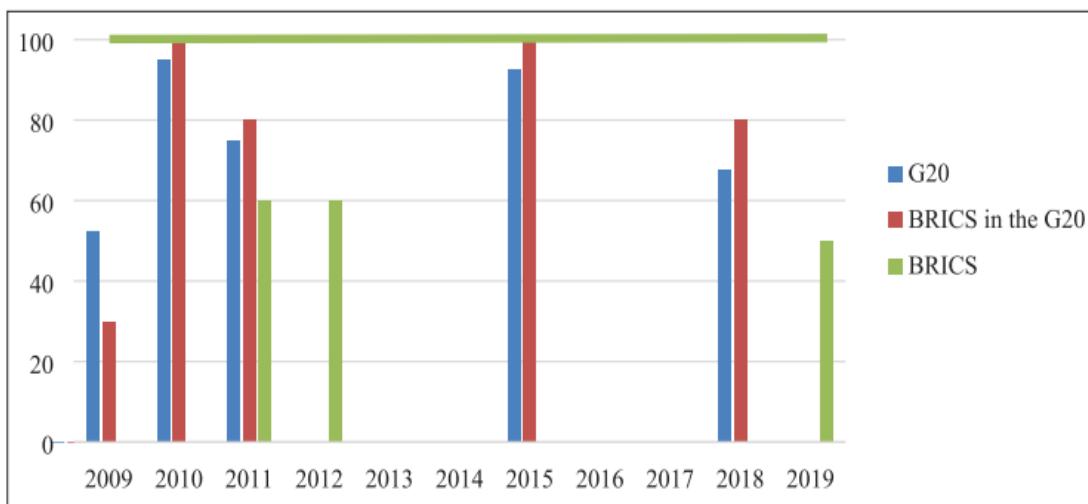
Secara struktural, NDB menerapkan prinsip kepemilikan dan hak suara yang lebih seimbang, di mana 55% suara dimiliki bersama oleh negara-negara anggota BRICS, dan setiap negara anggota memiliki peluang yang setara, berbeda dengan lembaga pembangunan multilateral biasa seperti Bank Investasi Infrastruktur Asia yang lebih dikuasai oleh satu negara, yaitu China (Puppim De Oliveira & Jing, 2020). Dalam proses pengambilan keputusan, NDB menerapkan aturan mayoritas dua pertiga untuk keputusan yang bersifat strategis dan mayoritas sederhana untuk keputusan lainnya, serta tidak menerapkan sistem veto seperti yang biasanya digunakan di lembaga-lembaga barat, yang menunjukkan upaya untuk menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan inklusif (Waisbich & Borges, 2020).

Dalam upaya menciptakan kemajuan di daerah Global South, khususnya di Afrika yang menghadapi berbagai masalah infrastruktur, NDB berusaha untuk mengatasi kebutuhan ini. Fasilitas seperti listrik, hunian, sarana transportasi, sumber air bersih, dan sanitasi masih menjadi tantangan besar bagi perkembangan di Afrika. Sekitar 65% populasi Afrika mengalami kesulitan dalam memperoleh akses kepada Listrik (Kocabay, 2024). Di tengah kondisi ini, negara-negara BRICS seperti India telah berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur dan program pelatihan di sejumlah negara Afrika seperti Nigeria, Zambia, dan Ghana.

Selain itu, negara-negara anggota BRICS perlu menyikirkan perbedaan politik mereka dari operasi NDB agar bank tersebut dapat berfungsi dengan baik dan memberikan akses pendanaan yang setara untuk semua negara anggota. Setelah memenuhi kebutuhan infrastruktur yang berkelanjutan bagi negara-negara BRICS, NDB diharapkan dapat memperluas jangkauannya ke negara-negara berkembang lainnya, sehingga memperkuat pengaruh BRICS dalam isu-isu politik global melalui penyaluran pinjaman dengan suku bunga rendah yang dapat membantu mengurangi ketidakmerataan pembangunan di negara-negara berkembang. Namun, NDB masih harus menghadapi sejumlah tantangan signifikan agar dapat menjadi alternatif utama bagi lembaga keuangan Barat, seperti membangun sistem yang kokoh dan menangani rintangan politik di dalam negeri.

Di sisi lain, BRICS memiliki keterbatasan dalam mengelola keuangan, pengaruh yang masih minim dalam pengambilan keputusan di lembaga keuangan global, serta sektor keuangan yang tidak sebanding dengan negara-negara besar lainnya. Oleh karena itu, BRICS belum merasa ada keuntungan signifikan untuk menciptakan sistem keuangan independen. Sebagai alternatif, mereka lebih memilih untuk bekerja sama dalam memperbaiki sistem yang telah ada daripada membangun sistem baru.

Setelah terjadinya krisis keuangan pada 2008-2009, tantangan baru muncul, seperti risiko yang terkait dengan inovasi teknologi keuangan dan stablecoin. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara BRICS, G20, dan organisasi internasional lainnya. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk mengatur inovasi keuangan yang baru serta memperkuat kapasitas pasar dan lembaga domestik melalui kemitraan dan pengembangan infrastruktur pembayaran nasional, termasuk sistem komunikasi finansial dan pembayaran internasional yang dirancang oleh BRICS (Larionova & Sheleporv, 2021)



Gambar 1. The G20 And BRICS' Compliance with Commitments on The Reform of IFI's, %.

Sumber: (Larionova & Shelepow, 2021)

Gambar 2 mengindikasikan bahwa BRICS menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup baik terhadap berbagai komitmen, bahkan dalam beberapa aspek hampir setara atau sama dengan rata-rata kepatuhan seluruh anggota G20. Ini menunjukkan bahwa meskipun BRICS tidak dapat secara signifikan mengubah kekuatan yang ada di institusi keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia, mereka tetap berkomitmen untuk mengikuti dan berusaha melaksanakan keputusan serta reformasi yang telah disepakati dalam konteks G20.

Kepatuhan ini mencerminkan dedikasi BRICS dalam mendukung perubahan yang lebih adil dan mewakili bagi negara-negara berkembang serta pasar-pasar yang sedang tumbuh, di samping menunjukkan keinginan mereka untuk berperan aktif dalam mengatur perekonomian global tanpa menentang sistem yang sudah ada. Pendekatan kerjasama ini selaras dengan realitas bahwa BRICS tidak menciptakan mekanisme kontrol keuangan alternatif secara luas, melainkan memilih untuk berkolaborasi dalam sistem regulasi yang sudah ada, serta mendukung pengembangan dan penyesuaian sistem tersebut karena keterbatasan dalam pengelolaan dan pasar keuangan mereka (Larionova & Shelepow, 2021).

Dengan demikian, BRICS berambisi untuk mendorong perubahan dan perbaikan dalam sistem keuangan dunia, mereka lebih berperan sebagai mitra yang bermanfaat dalam mekanisme G20 daripada sebagai penentang terhadap sistem keuangan global yang dikuasai Barat saat ini. Selain itu, grafik tersebut juga mengindikasikan bahwa usaha BRICS untuk melakukan reformasi terhadap lembaga-lembaga keuangan internasional tidak hanya berupa janji, melainkan juga disertai dengan tindakan konkret dan kepatuhan terhadap komitmen internasional yang telah mereka tetapkan.

### 3.3. Tantangan dan Peluang Strategis BRICS

BRICS dilihat sebagai forum paling komprehensif, mewakili negara-negara berkembang di arena global. Meskipun sering kali dipandang sebagai sarana yang digunakan oleh China dan Rusia untuk menantang pengaruh negara-negara Barat, keanggotaan BRICS juga mencerminkan kurangnya strategi bersama yang tegas serta pandangan yang seragam, serta adanya ketidakseimbangan ekonomi di dalam grup itu sendiri, di mana China memiliki peran yang lebih dominan secara ekonomi dibandingkan dengan anggota lainnya. Adanya ketidakpercayaan dan tantangan dalam kolaborasi nyata di antara anggota BRICS serta dengan negara-negara berkembang lain menghalangi kapabilitas untuk melakukan reformasi sistem global secara efisien dan membangun sistem dunia yang lebih beragam.

Negara-negara dalam kelompok BRICS, telah muncul sebagai pemain utama di arena ekonomi global. Kelompok ini tidak hanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam mengubah cara sistem ekonomi dunia beroperasi. Mereka memiliki pengaruh yang besar dalam hal perdagangan internasional, investasi, serta kebijakan keuangan global. Walaupun begitu, negara-negara BRICS masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti

tingginya angka kemiskinan, ketergantungan pada ekspor bahan mentah, korupsi, dan kurangnya inovasi.. Berikut adalah tantangan yang dihadapi oleh BRICS (Larionova & Sheleпов, 2021):

- 1) Perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi: Meskipun BRICS menyumbang sekitar 15% dari perekonomian dunia di tahun 2008, produktivitas per kepala mereka hanya sekitar sepertiga dari rata-rata global dan di bawah 10% dari rata-rata negara maju. Ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara negara BRICS dan negara maju, sehingga mereka perlu mempercepat upaya pembangunan mereka.
- 2) Kelemahan dalam institusi dan kebebasan ekonomi: Indeks kebebasan ekonomi negara-negara BRICS menunjukkan penurunan, yang mengisyaratkan adanya masalah dalam kesiapan lembaga dan sistem hukum. Hal ini bisa menghambat investasi baik domestik maupun asing, yang sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- 3) Masalah korupsi: Korupsi menjadi penghalang signifikan bagi kemajuan ekonomi BRICS. Praktik korupsi ini mengurangi kepercayaan masyarakat internasional, merusak distribusi sumber daya sosial, dan menimbulkan konflik internal.
- 4) Kerjasama dan persaingan di antara negara BRICS: Walaupun terdapat semangat kerjasama yang kuat, negara-negara BRICS juga terlibat dalam kompetisi untuk menguasai pasar global. Dinamika antara kerjasama dan persaingan ini memiliki dampak yang positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing negara.

**Tabel 2. Tingkat Korupsi di Negara Anggota BRICS**

Negara	Peringkat Korupsi	Skor Korupsi	Implikasi
Brasil	69	43	Tingkat korupsi relatif lebih rendah dibandingkan BRICS lainnya, namun masih menjadi kendala dalam pembangunan ekonomi dan sosial.
Afrika Selatan	69	43	Sama dengan Brasil, menunjukkan tingkat korupsi yang moderat dalam kelompok BRICS.
China	80	39	Tingkat korupsi yang lebih tinggi dibanding Brasil dan Afrika Selatan, memengaruhi alokasi sumber daya dan citra internasional.
India	94	36	Korupsi menjadi tantangan serius, menghambat inovasi dan pembangunan ekonomi.
Rusia	113	33	Peringkat terendah dan skor terendah di BRICS, menunjukkan korupsi yang signifikan dan berdampak negatif terhadap perkembangan negara.

Sumber: (Larionova & Sheleпов, 2021).

Peluang untuk menyatukan ekonomi negara-negara BRICS bergantung pada semakin miripnya kondisi ekonomi di antara mereka. Ini didorong oleh perjanjian perdagangan yang penting, peningkatan investasi, dan tujuan pembangunan yang sejalan. Meskipun masih ada banyak perbedaan dalam cara setiap negara mengelola ekonominya, pembicaraan terus menerus tentang kebijakan dan upaya untuk bekerja sama dalam menghadapi krisis ekonomi dunia menunjukkan bahwa ada landasan yang kuat untuk menjaga integrasi ekonomi tetap ada. Pembentukan lembaga seperti NDB tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga menjadi tempat untuk mengatur kebijakan uang dan pajak antar negara BRICS. Kerja sama ini sangat penting untuk menghadapi masalah ekonomi yang tidak merata dan memperkuat stabilitas dollar yang digunakan bersama. Selain itu, kerja sama dalam proyek infrastruktur dan pengembangan yang berkelanjutan menunjukkan kesepakatan bersama untuk tujuan ekonomi jangka panjang, yang semakin memperkuat potensi untuk penggabungan yang lebih mendalam di dalam BRICS (Nach & Ncwadi, 2024). Oleh karena itu, langkah strategis untuk menyatukan kebijakan, terutama dalam menghadapi tekanan dari luar, sangat penting untuk menyiapkan dasar bagi pengenalan mata uang bersama dan

meningkatkan peran BRICS dalam memimpin sistem keuangan yang lebih bertingkat di seluruh dunia.

Dari sudut pandang ekonomi, BRICS mencakup lebih dari 40% populasi dunia dan menyumbangkan sebagian besar total Produk Domestik Bruto (PDB) global. China dan India menjadi dua negara utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun mendatang (Vinicius & Freitas, 2025). Kelompok ini menunjukkan kekuatan dan kemampuan yang adaptif, dengan mengubah fokus dari masalah ekonomi tradisional ke area baru seperti pemerintahan digital, perubahan iklim, dan kesehatan masyarakat, menunjukkan bahwa mereka peduli dengan isu-isu global saat ini. Selain itu, BRICS terus menambah anggota baru melalui inisiatif "BRICS+", dengan mengundang negara-negara seperti Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Iran, dan Uni Emirat Arab pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa BRICS ingin memperbesar pengaruhnya dan menyuarakan lebih banyak pendapat dalam sistem global (Vinicius & Freitas, 2025). Namun, ada beberapa masalah, seperti dominasi ekonomi China yang menciptakan ketidakseimbangan kekuatan, kemampuan organisasi yang terbatas, dan konflik geopolitik di antara anggota, termasuk masalah perbatasan antara India dan China, serta tindakan agresif dari Rusia (Hurrell, 2007). Masalah-masalah ini bisa mengganggu kesatuan dan efektivitas BRICS sebagai pemain di dunia. Meskipun demikian, dengan populasi yang besar, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, dan pendekatan yang fleksibel, BRICS diharapkan akan terus memperluas pengaruhnya di arena internasional.

Ada beberapa langkah yang harus diambil, seperti meningkatkan kemampuan organisasi dengan membuat sekretariat tetap dan proses pengambilan keputusan yang lebih resmi, agar bisa lebih baik dalam bekerja sama dan melakukan kebijakan. Selain itu, BRICS harus mengurangi ketergantungan yang terlalu besar pada China dengan mendorong kerjasama ekonomi yang lebih erat di antara anggotanya, misalnya lewat perjanjian perdagangan bebas atau memakai mata uang yang sama untuk transaksi perdagangan dan keuangan. Untuk memperkuat persatuan kelompok, sangat penting juga untuk menyelesaikan ketegangan geopolitik di dalam kelompok melalui dialog rutin, membangun kepercayaan, dan fokus pada masalah bersama seperti perubahan iklim dan kesehatan masyarakat. Meskipun China berperan besar di BRICS dengan memberikan dukungan finansial dan pengaruh diplomatik yang kuat, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang keseimbangan kekuasaan di kelompok tersebut.

#### 4. Simpulan

Kelompok BRICS, sekarang menjadi kekuatan utama dalam mengelola ekonomi global. Mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Setiap negara anggota memiliki kekuatan ekonomi dan demografi yang besar, terutama China dan India, yang memiliki jumlah penduduk yang besar serta produk domestik bruto yang terus meningkat. BRICS juga menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan mengembangkan fokus baru, seperti isu digital, perubahan iklim, dan kesehatan masyarakat. Berbagai strategi yang dilakukan oleh BRICS berusaha untuk meningkatkan posisi mereka dalam tata kelola global, mengurangi ketergantungan pada kekuatan Barat, dan memperkuat kerja sama ekonomi di antara anggota dengan membentuk perjanjian perdagangan bebas serta menggunakan mata uang lokal dalam transaksi di antara mereka.

Namun, BRICS masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks yang dapat menghambat kesatuan dan efektivitas kelompok ini. Tantangan utama yang dihadapi termasuk ketidakseimbangan kekuatan, khususnya dominasi ekonomi China, konflik geopolitik di antara anggota seperti ketegangan di perbatasan antara India dan China, serta masalah korupsi dan kelemahan dalam institusi internal. Meski menghadapi berbagai tantangan ini, anggota BRICS tetap menunjukkan komitmen untuk memperkuat organisasi dengan membangun sekretariat tetap serta proses pengambilan keputusan yang lebih teratur. Dengan populasi yang besar, pertumbuhan ekonomi yang terus menanjak, dan pendekatan yang fleksibel dalam menangani isu-isu global, BRICS dipercaya dapat terus meningkatkan pengaruhnya dan berkontribusi dalam membentuk sistem ekonomi dunia ke arah yang lebih adil, inklusif, dan setara.

## Daftar Pustaka

- Avant, D. D., Finnemore, Martha., & Sell, S. K. . (2010). Who governs the globe? Cambridge University Press.
- Bezerra, V. da S. (2020). Institutionalization of the BRICS discourse: How does the NDB embody the group's views on global financial governance? *BRICS Journal of Economics*, 1(4), 70–81. <https://doi.org/10.38050/2712-7508-2020-1-4-7>
- Biermann, F., Pattberg, P., Van Asselt, H., Zelli, F., & Biermann, • Frank. (2009). The Fragmentation of Global Governance Architectures The Fragmentation of Global Governance Architectures: A Framework for Analysis.
- Chen, X., & Zhang, S. (2025). BRICS and Global Governance: An Analysis from the Perspective of International Political Economy. *Journal of Fintech and Business Analysis*, 2(1), 44–49. <https://doi.org/10.54254/3049-5768/2025.21635>
- Duggan, N., Hooijmaaijers, B., Rewizorski, M., & Arapova, E. (2022a). Introduction: 'The BRICS, Global Governance, and Challenges for South-South Cooperation in a Post-Western World.' *International Political Science Review*, 43(4), 469–480. <https://doi.org/10.1177/01925121211052211>
- Duggan, N., Hooijmaaijers, B., Rewizorski, M., & Arapova, E. (2022b). Introduction: 'The BRICS, Global Governance, and Challenges for South-South Cooperation in a Post-Western World.' *International Political Science Review*, 43(4), 469–480. <https://doi.org/10.1177/01925121211052211>
- Falkner, R. (2003). Private Environmental Governance and International Relations Private Environmental Governance and International Relations: Exploring the Links.
- Freddy, H. J., & Thomas, C. J. (2023). Status Competition: The BRICS' Quest for Influence in Global Governance. *China Report*, 59(4), 388–401. <https://doi.org/10.1177/00094455231187054>
- Hurrell, Andrew. (2007). Power, Values and the Constitution of International Society. Oxford University Press, 2(1), 148–152. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=394341992007>
- Kocabay, S. (2024). BRICS AND NEW DEVELOPMENT BANK ANALYZING THE OPERATIONS OF BRICS' NEW DEVELOPMENT BANK IN THE GLOBAL SOUTH.
- Kozub-Karkut, M. (2014). Global Governance – a Perspective on World Politics. Four Theoretical Approaches. *Athenaeum Polskie Studia Politologiczne*, 4(44), 22–42. <https://doi.org/10.15804/athena.2014.44.02>
- Larionova, M., & Shelepor, A. (2021). BRICS, G20 and global economic governance reform. *International Political Science Review*. <https://doi.org/10.1177/01925121211035122>
- Li, J., & Pogodin, S. (2020). BRICS Economic Cooperation Factors in Global Governance. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 940(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/940/1/012029>
- N. Rosenau, J., & Otto Czempiel, E. (1992). Governance Without Government. In *Governance without Government*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511521775>
- Nach, M., & Ncwadi, R. (2024). BRICS economic integration: Prospects and challenges. *South African Journal of International Affairs*, 31(2), 151–166. <https://doi.org/10.1080/10220461.2024.2380676>
- Nogueira Batista Jr., Paulo. (2023). A BRICS Currency? *Govern- Ance & Cultural Exchange Forum* 2023.
- O'Neill, J. (2001). Building Better Global Economic BRICs. <https://www.gs.com>
- Prakash, A., & A.Hart, J. (2000). Globalization and Governance.
- PRIA. (2024). Engaging BRICS as Emerging Global Governance Institution.
- Puppim De Oliveira, J. A., & Jing, Y. (2020). International Development Assistance and the BRICS. <http://www.palgrave.com/gp/series/15023>
- Radulescu, I. G., Panait, M., & Voica, C. (2014a). BRICS Countries Challenge to the World Economy New Trends. *Procedia Economics and Finance*, 8, 605–613. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00135-x](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00135-x)
- Radulescu, I. G., Panait, M., & Voica, C. (2014b). BRICS Countries Challenge to the World Economy New Trends. *Procedia Economics and Finance*, 8, 605–613. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00135-x](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00135-x)
- Shaw, T. M. (2015). From post-BRICS' decade to post-2015: Insights from global governance and comparative regionalisms. *Palgrave Communications*, 1. <https://doi.org/10.1057/palcomms.2014.4>

- Stojkovic, R. (2016). The new development bank BRICS. *Bankarstvo*, 45(2), 76–91.  
<https://doi.org/10.5937/bankarstvo1602076s>
- Stoker, G. (1998). Governance as theory: five propositions.
- Swanstrom's, N. (2024). BRICS; Evolving into a vehicle for inclusive multilateralism. Institute for Security and Development Policy.
- The Foreign Ministers of Brazil, R. I. and C. (2008). Joint Communiqué.
- Vinicio, M., & Freitas, D. E. (2025). BRICS A New Framework for New South Inclusiveness.
- Waisbich, L. T., & Borges, C. (2020). The BRICS' New Development Bank at the Crossroads: Challenges for Building Development Cooperation in the Twenty-First Century. In *Governing China in the 21st Century* (pp. 149–187). Palgrave Macmillan. [https://doi.org/10.1007/978-981-32-9644-2\\_7](https://doi.org/10.1007/978-981-32-9644-2_7)
- Yardley, J. (2012, March 29). BRICS Leaders Fail to Create Rival to World Bank.  
<Https://Www.Nytimes.Com/2012/03/30/World/Asia/Brics-Leaders-Fail-to>Create-Rival-to-World-Bank.Html>.